

## ABSTRAK

Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, berdampak terhadap nelayan bagan perahu di Kota Padang. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kaitan Permen KP No. 71 Tahun 2016, hambatan yang dihadapi nelayan serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kaitan Permen KP No 71 Tahun 2016 sangat erat sebagaimana telah diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Permen KP No 71 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (2) mengenai mesh size dan watt lampu (2) Hambatan yang dihadapi nelayan dalam pengoperasian alat penangkap ikan meliputi pengurusan izin SIUP, SIPI, VMS untuk kapal bagan diatas 30 GT (3) Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan Permen KP No. 71 Tahun 2016 berdasarkan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities Threats*, diperoleh strategi penggantian Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) bagan perahu sesuai Permen KP di Kota Padang, penggunaan API dan ABPI bagan perahu harus memperhatikan stok populasi sumber daya ikan di laut, mengembangkan pelatihan kepada nelayan bagan terhadap penggunaan API, dan mengembangkan mata pencaharian alternatif nelayan.

**Kata Kunci :** Permen KP, Alat Tangkap Bagan

## **ABSTRACT**

The implementation of the Minister of Maritime and Fisheries Affairs' Act No. 71 of Year 2016 has been having an impact on boat lift net in Padang City. The purpose of the study was to analyze the relationship between the Minister of Maritime and Fisheries Affairs' Act No. 71 of Year 2016, the barriers faced by fishermen, and the efforts made by the local government of the Padang City. This study employed descriptive research method. The results of the study revealed that (1) the linkage of the Minister of Maritime and Fisheries Affairs' Act No. 71 of Year 2016 was very close to Act No. 45 of Year 2009 concerning fisheries and the Minister of Maritime and Fisheries Affairs' Act No. 71 Year of 2016 with Article 27 issues 2 concerning mesh size and wattage of lamps. (2) Certain barriers which were faced by fishermen in operating the fishing equipment included the bureaucracy permission of SIUP, SIPI, Nets, lamp size, and VMS for boat lift net above 30 GT. (3) Efforts made by the local government of Padang City in order to implement Minister of Maritime and Fisheries Affairs Act No. 71 Year of 2016 was based on the analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) namely to replace fishing tools (API) strategy, fishing tools aids (ABPI), the usage of API and ABPI boat lift net should be consider the population of fish resources, to develop training for fishermen's boat lift net particularly in order to use the API, and develop alternative fishermen income.

**Keywords:** Minister of Maritime and Fisheries Affairs Act, Boat Lift Net